

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM RT BERSIH DI DESA KUALA LAPANG  
KABUPATEN MALINAU**

**Sherly Maryesih, Daryono Daryono**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 14, Nomor 1, 2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program RT Bersih di  
Desa Kuala Lapang Kabupaten Malinau.

Pengarang : Sherly Maryesih

NIM : 2102016068

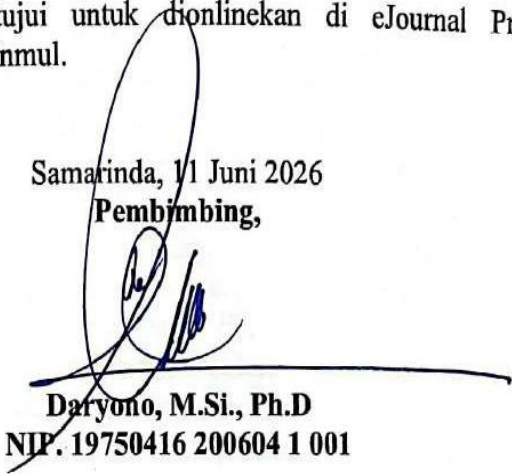
Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi  
Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 11 Juni 2026

Pembimbing,



Daryono, M.Si., Ph.D  
NIP. 19750416 200604 1 001

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

**Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik**

**Volume : 14**

**Nomor : 1**

**Tahun : 2026**

**Halaman : 125-139**

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM RT BERSIH DI DESA KUALA LAPANG KABUPATEN MALINAU**

**Sherly Maryesih<sup>1</sup>, Daryono Daryono<sup>2</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program RT Bersih di Desa Kuala Lapang beserta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu deskriptif kualitatif. Fokus penelitian mengacu pada partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil dan partisipasi dalam evaluasi serta faktor penghambat dalam bentuk partisipasi pada pelaksanaan program RT Bersih di Desa Kuala Lapang. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini berupa model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana berupa Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program RT Bersih di Desa Kuala Lapang belum berjalan dengan optimal. Pada beberapa aspek, seperti aspek partisipasi dalam pengambilan Keputusan belum berjalan dengan optimal karena kehadiran masyarakat secara langsung dalam menjalankan kegiatan fisik, akan tetapi keseluruhan pelaksanaan kegiatan terfasilitasi sumber daya yang memadai, sehingga aspek partisipasi dalam pelaksanaan telah berjalan meskipun belum optimal. Pada aspek partisipasi dalam pengambilan manfaat telah berjalan optimal ditinjau dari adanya dampak nyata terhadap komitmen dalam memiliki hasil program secara kolektif. Kemudian, aspek partisipasi dalam evaluasi, telah berjalan optimal ditinjau dari adanya forum evaluasi tingkat RT hingga desa serta adanya sistem pelaporan terhadap program secara sistematis dari desa ke pemerintah daerah. Adapun faktor penghambat dalam bentuk partisipasi pada pelaksanaan program RT Bersih, meliputi kondisi waktu yang bentrok dalam prioritas hidup masyarakat dengan pekerjaan di Desa Kuala Lapang, dan tidak adanya sosialisasi pada awal pelaksanaan program RT Bersih pada setiap RT.*

**Kata Kunci :** *Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, RT Bersih*

## **Pendahuluan**

Pemerintah Kabupaten Malinau telah menghadirkan Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dengan 13 program utama dan 3 program unggulan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [sherlymaryesih10@gmail.com](mailto:sherlymaryesih10@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

mengacu pada 4 pilar pembangunan desa yaitu pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan kemasyarakatan desa, pembinaan masyarakat desa, dan penyelenggaraan pemerintah desa (Willius et al., 2022). Hal ini menjadikan semangat baru bagi Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan pembangunan secara holistik mulai dari pemberdayaan masyarakat di level terkecil. Salah satu program unggulan dari GERDEMA adalah RT BERSIH (Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah, dan Harmonis) yang telah diluncurkan sejak tahun 2016. Tertuang dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 tentang Program RT Bersih, program ini bertujuan memberdayakan masyarakat melalui alokasi dana langsung ke tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan menyentuh langsung unit sosial terkecil, Program RT bersih bertujuan untuk pemerataan pembangunan pada aspek kebersihan, ketertiban, dan infrastruktur fisik dasar di lingkungan RT.

Desa Kuala Lapang merupakan salah satu desa di Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau yang turut melaksanakan program RT Bersih. Diketahui bahwa Desa Kuala Lapang memiliki jumlah penduduk sebesar 3.099 jiwa yang tersebar di 8 RT yang mana keseluruhan RT turut serta dalam pelaksanaan program RT Bersih. Program RT Bersih memiliki strategi untuk mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Malinau melalui manajemen program yang dilaksanakan secara *bottom-up* dan partisipatif yang melalui musyawarah masyarakat mulai dari tingkat RT. Guna memastikan program RT Bersih berjalan sesuai harapan, disalurkan dana khusus kepada RT sebagai bentuk dukungan anggaran senilai Rp.260.000.000 dan pengelolaan dana diserahkan kepada pihak RT (Ketua dan Pengurus RT) yang merupakan *supporting line* sebagai lembaga yang berada paling dekat dengan masyarakat dan memahami berbagai permasalahan di lingkungannya.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan Program RT Bersih di Desa Kuala Lapang menghadapi kendala dalam hal partisipasi masyarakat desa. Diketahui bentuk partisipasi masyarakat pada kegiatan Program RT Bersih Tahun 2024 di Desa Kuala Lapang belum optimal. Hal ini karena bentuk partisipasi masyarakat memiliki angka yang bervariasi pada setiap RTnya.

Berdasarkan data Desa Kuala Lapang, pada RT 002 dan RT 003 terdapat bentuk partisipasi tertinggi yaitu mencapai 90%, dimana dari 329 warga di RT 002, sebanyak 296 warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan Program RT Bersih Tahun 2024. Sedangkan di RT 003 dari 339 warga, sebanyak 305 warga terlibat dalam program tersebut. Sebaliknya, terdapat tiga RT yang menunjukkan bentuk partisipasi rendah yaitu RT 001, RT 004, dan RT 006 dengan persentase partisipasi hanya 40%. Selain itu, berdasarkan data Desa Kuala Lapang, RT 004 sebagai RT dengan jumlah warga terbanyak sebesar 550 warga dengan total 138 Kepala Keluarga (KK). Pada RT 005 menunjukkan partisipasi sebesar dengan 80%, RT 007 dengan 75%, dan RT 008 dengan 60%. Kesenjangan bentuk partisipasi yang cukup besar pada ketiga RT tersebut mengindikasikan bahwa

kegiatan yang direncanakan dan didanai tidak dapat mencerminkan kebutuhan mayoritas warga.

Selanjutnya, kendala yang dihadapi adalah banyak warga RT masih minim untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Program RT Bersih. Sebagaimana hasil observasi awal peneliti, disampaikan oleh ketua dan pengurus RT bahwa kesadaran warga masih minim untuk berpartisipasi dalam gotong royong membersihkan lingkungan atau kerja bakti serta kurangnya partisipasi warga dalam mengikuti sosialisasi kegiatan. Minimnya partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan fisik meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh pengurus RT mengindikasikan lemahnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial warga terhadap program yang telah direncanakan. Adapun konflik waktu yang bentrok terhadap prioritas hidup masyarakat dengan berbagai pekerjaan sehingga terjadi keterbatasan waktu dan tenaga akibat tuntutan pekerjaan utama membuat partisipasi sukarela dalam kegiatan RT menjadi prioritas terakhir sehingga semangat kegotong-royongan yang menjadi salah satu dasar program sulit diwujudkan secara optimal.

Partisipasi masyarakat yang bermakna dan konsisten akan menjadi penentu terwujudnya cita-cita RT Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah, dan Harmonis sebagaimana yang dicita-citakan oleh Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 tentang Program RT Bersih. Meskipun demikian terdapat beberapa sasaran strategis capaian yang masih dibawah target yang diinginkan. Oleh karena itu, pada penelitian ini menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program RT Bersih di Desa Kuala Lapang Kabupaten Malinau, dan mengidentifikasi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program RT Bersih di Desa Kuala Lapang Kabupaten Malinau.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Manajemen***

Manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan (Satibi, 2012). Siagian (2002) menyatakan bahwa manajemen kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil melalui kegiatan orang lain. Berdasarkan pendapat tersebut, manajemen adalah kemampuan dan proses sistematis untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya melalui serangkaian fungsi koordinatif perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

### ***Manajemen Publik***

Menurut Henry (dalam Rachman, 2021) manajemen publik adalah proses pengelolaan organisasi publik yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan pelayanan

publik secara efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik adalah disiplin yang mengkaji tata kelola organisasi pemerintahan melalui serangkaian fungsi guna mendayagunakan sumber daya publik secara optimal.

### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pemberian kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Menurut Rappaport (dalam Hutagalung, 2022), pemberdayaan adalah proses dimana individu, organisasi, dan komunitas mendapatkan penguasaan atas kehidupan mereka. Konsep ini menekankan pada transformasi dari kondisi ketergantungan menuju kemandirian.

### ***Partisipasi Masyarakat***

Menurut Adisasmita (dalam Fatima et al., 2022), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011), partisipasi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan Keputusan: Partisipasi jenis ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan: Partisipasi jenis ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pelaksanaan, maupun tujuan yang telah ditetapkan dilihat dari kontribusi dengan tenaga, uang, dan bahan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat: Partisipasi jenis ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kuantitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan “*output*”. Sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak.
4. Partisipasi dalam evaluasi: Partisipasi jenis ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

### ***Program RT BERSIH***

Program RT Bersih bermula dari komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat guna membangun keluarga produktif (Ariani, 2015). Program ini lahir dari kesadaran akan peran strategis Rukun Tetangga (RT) sebagai unit terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sekaligus respon terhadap kebutuhan akan suatu wadah yang dapat mengakomodasi partisipasi masyarakat secara luas dalam proses

pembangunan. Sebagai program unggulan daerah, RT Bersih dirancang bukan hanya sebagai gerakan kebersihan semata, tetapi sebagai sebuah pendekatan holistik yang mentransformasi RT (Andreas, 2017) menjadi pusat pembangunan komunitas melalui penanaman nilai-nilai kerapian, ketertiban, kebersihan, kesehatan, keindahan, dan keharmonisan, dengan semangat kegotongroyongan sebagai jiwa pelaksanaannya.

Program RT Bersih merupakan program yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 tentang Program RT Bersih guna mengatasi persoalan klasik masyarakat seperti masalah kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah di tingkat RT, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan, dan menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu deskriptif kualitatif. Fokus penelitian mengacu pada partisipasi dalam perencanaan, partisipasi, dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil dan partisipasi dalam evaluasi serta faktor penghambat dalam bentuk partisipasi pada pelaksanaan program RT Bersih di Desa Kuala Lapang. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana berupa Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program RT Bersih di Desa Kuala Lapang Kabupaten Malinau***

##### **1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan**

Partisipasi dalam pengambilan keputusan menjadi fondasi utama keberlanjutan suatu program. Aspek tersebut merupakan dimensi fundamental dalam siklus manajemen pembangunan yang berfungsi sebagai faktor utama bagi keberlanjutan dan relevansi sebuah program. Mengacu pada kerangka kerja teoritis Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011), partisipasi pada tahap ini tidak sekadar dimaknai sebagai kehadiran fisik masyarakat dalam forum pertemuan, melainkan didefinisikan sebagai keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan awal. Proses ini mencakup spektrum kegiatan yang krusial, mulai dari identifikasi masalah lokal, perumusan tujuan program, penyusunan strategi operasional, hingga penetapan prioritas alokasi sumber daya.

Partisipasi masyarakat Desa Kuala Lapang pada program RT Bersih telah dilembagakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang didukung anggaran transparan sebesar Rp 260.000.000,00 per RT.

Pelembagaan ini sejalan dengan pemikiran Conyers (dalam Lenama, 2021) yang menegaskan bahwa perencanaan partisipatif harus menjadi proses tindak lanjut dengan memberikan masyarakat sebuah ruang resmi untuk mempengaruhi keputusan publik, bukan sekadar formalitas sesaat. Lebih lanjut, Dusseldorp (dalam Kristiniati & Choiriyah, 2014) menekankan bahwa efektivitas partisipasi perencanaan sangat ditentukan oleh kejelasan prosedural dan logistik. Hal tersebut dilihat dari adanya regulasi Peraturan Bupati dan alokasi dana spesifik seperti operasional, tunjangan dan kegiatan, sehingga memungkinkan warga merasionalkan usulan berdasarkan pagu yang tersedia.

Partisipasi masyarakat pada kegiatan Program RT Bersih memiliki disparitas yang tajam, dengan rata-rata partisipasi desa 62%, namun menurun hingga 40% di wilayah seperti RT 001, 004, dan 006. Sebagaimana pernyataan oleh Ginting et al. (2024) menjelaskan bahwa kondisi pada wilayah partisipasi rendah ini masih terindikasi pada tingkat sekadar formalitas, ditinjau dari masyarakat hanya dihitung hadir tanpa memiliki kontribusi nyata untuk memperjuangkan aspirasi krusial. Sejalan dengan Hidayah et al. (2024) menekankan bahwa kehadiran yang diakumulasikan dalam forum tidak otomatis menjamin adanya proses pembagian kekuasaan. Meskipun forum yang dilakukan bersama masyarakat cenderung masif, namun aspirasi warga seringkali tidak terakomodasi sehingga mengindikasikan kehadiran yang pasif. Partisipasi secara kolektif seringkali didominasi oleh kelompok tertentu saja, sehingga menyebabkan ketimpangan keterwakilan terhadap kebutuhan kelompok warga yang kurang aktif seperti di RT 004 menjadi tidak terlihat dalam dokumen perencanaan akhir.

Terdapat beberapa wilayah Desa Kuala Lapang memiliki proses pengambilan keputusan yang berjalan melalui komunikasi hanya sebatas "himbauan" dan pengambilan keputusan dilakukan internal oleh pengurus RT karena kesibukan warga, sehingga partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan program RT Bersih di Desa Kuala Lapang telah berjalan namun belum optimal ditinjau pada masyarakat yang berasal dari beberapa wilayah RT kurang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Secara struktural dan prosedural, partisipasi telah berjalan efektif melalui pelembagaan mekanisme Musrenbang yang didukung oleh transparansi alokasi anggaran sebesar Rp 260.000.000,00 per RT. Namun, partisipasi masyarakat masih belum memenuhi standar partisipasi yang inklusif secara menyeluruh. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya ketimpangan terhadap tingkat partisipasi yang drastis antar wilayah RT dan adanya dominasi peran pengurus RT dalam pengambilan keputusan akibat tingginya mobilitas warga. Kondisi ini menyebabkan pergeseran pola partisipasi di beberapa wilayah RT yang seharusnya bersifat musyawarah aktif, melainkan partisipasi yang bersifat pendelegasian atau bahkan cenderung elitis sehingga aspirasi kebutuhan krusial

sebagian warga tidak terakomodasi secara optimal dalam pengambilan keputusan akhir.

Perencanaan partisipatif melalui Musrenbangdes memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Namun demikian, terdapat kendala berupa keterbatasan partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, kondisi yang terjadi di Desa Kuala Lapang menunjukkan kesamaan bahwa forum partisipasi telah tersedia, tetapi tingkat keterlibatan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

## 2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan adalah tahap pembuktian rencana yang masih berupa konsep diubah menjadi tindakan nyata di lapangan. Merujuk pada pemikiran Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011), tahap ini tidak boleh diartikan sekadar masyarakat menuruti perintah atau instruksi dari atas.

Lebih dari itu, partisipasi pelaksanaan adalah tentang kemauan warga untuk menyumbangkan sumber daya yang mereka miliki, baik berupa tenaga, uang, maupun material, untuk mewujudkan program tersebut. Pentingnya tahap ini, karena ketika masyarakat terlibat langsung bekerja dan berkorban secara fisik, secara alami akan tumbuh rasa memiliki yang kuat terhadap hasil pembangunan. Tanpa keterlibatan aktif dalam pelaksanaan ini, sebuah program hanya akan dianggap sebagai "proyek pemerintah" semata, bukan milik warga, sehingga keberlanjutannya di masa depan menjadi sulit dijamin.

Masyarakat turun tangan langsung menyumbangkan waktu dan tenaga untuk pekerjaan fisik, seperti menggali saluran air (SPAL) di RT 008, penyediaan taman baca di RT 005, kegiatan semenisasi jalan di RT 004 maupun kerja bakti rutin. Uphoff (2011) menyatakan bahwa bagi masyarakat desa yang uangnya terbatas, tenaga adalah modal utama yang bisa diberikan untuk membangun desa. Namun, hasil temuan penelitian pun menunjukkan situasi yang kontras di RT 004, di mana kehadiran warga dalam gotong royong tergolong minim. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fatimah et al. (2022), menyatakan bahwa warga desa bukanlah orang yang apatis, melainkan pemikir rasional. Ketika jadwal gotong royong bentrok dengan jam kerja atau waktu ibadah, masyarakat desa secara logis memilih kegiatan yang menjamin kebutuhan keberlangsungan hidup atau kewajiban beragama, karena itu menyangkut keamanan hidup masyarakat secara fundamental. Sejalan dengan Olson (dalam Lenama, 2021) menyatakan bahwa tanpa adanya keuntungan pribadi yang diperoleh, umumnya jika seseorang memilih untuk tidak terlibat dan membiarkan orang lain yang bekerja, selama mereka tetap bisa menikmati hasil akhirnya tanpa harus bersusah payah.

Masyarakat desa hampir tidak mengeluarkan uang atau material karena Pemerintah Daerah telah menanggung biayanya melalui anggaran Rp 260 juta per RT. Selain itu, masyarakat yang bekerja fisik seperti semenisasi jalan

mendapatkan upah, dan petani diberikan alat semprot serta bibit gratis. Menurut Isnaini et al. (2025) menyatakan bahwa bahwa pola hubungan ini adalah contoh nyata dari apa yang disebut sebagai partisipasi yang disponsori negara. Lebih lanjut, pemerintah tidak menarik sumber daya dari warga, tetapi justru memberikan modal untuk memancing warga agar ikut serta terlibat dalam program.

Pelaksanaan program dibagi ke dalam empat bidang jelas, meliputi: Pemerintahan, Pembinaan, Pemberdayaan, dan Pembangunan. Dalam proses pelaksanaannya pun tidak kaku, melainkan menyesuaikan dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa di masing-masing RT. Contohnya, RT 005 butuh alat pertanian, sementara RT 004 butuh pelatihan menjahit. Menurut Ginting et al. (2024) menekankan bahwa program pembangunan akan sukses jika pelaksanaannya dapat beradaptasi dengan karakter lokal yang berbeda-beda. Langkah memberikan alat pertanian yang sesuai dengan mata pencaharian masyarakat menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan program RT Bersih. Selain itu, peran pengurus RT yang aktif mengelola dana dan kegiatan dalam rangka mendukung program RT Bersih. Menurut Fatimah et al. (2022) keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan lembaga lokal dalam mentransmisikan aturan pemerintah menjadi aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program RT Bersih di Desa Kuala Lapang telah berjalan, namun belum optimal ditinjau pada beberapa masyarakat yang ada di beberapa wilayah RT kurang ikut serta terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Secara proses pelaksanaan, bentuk partisipasi yang paling dominan adalah kontribusi tenaga masyarakat terlibat secara fisik untuk merealisasikan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Hal tersebut pun didukung penuh oleh alokasi anggaran pemerintah desa yang berfungsi sebagai penyedia modal untuk memicu produktivitas warga. Meskipun model kemitraan ini berhasil memastikan program berjalan sesuai standar operasional melalui pembagian bidang yang sistematis, tingkat partisipasi tenaga tidak seragam di seluruh wilayah. Efektivitas mobilisasi tenaga kerja masyarakat terbukti masih dipengaruhi dengan prioritas keberlangsungan hidup dilihat dari wilayah dengan mayoritas penduduk yang memiliki kesibukan kerja cenderung memiliki tingkat partisipasi gotong royong yang lebih rendah.

### 3. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat merupakan aspek yang krusial dalam siklus proyek pembangunan, yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana *output* pembangunan didistribusikan secara adil dan merata kepada kelompok masyarakat. Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011), partisipasi pada tahap ini tidak hanya dilihat dari aspek pengambilan manfaat material seperti infrastruktur fisik atau pendapatan, tetapi juga mencakup manfaat immaterial seperti peningkatan pengetahuan, status sosial, dan rasa percaya diri.

Pelaksanaan program RT Bersih di Desa Kuala Lapang memiliki kontribusi secara nyata melalui pembangunan infrastruktur krusial seperti perbaikan akses jalan dan semenisasi gang di RT 006, penyediaan alat produksi pertanian berupa bibit, tangki semprot, dan mesin rumput di RT 005. Sejalan dengan Ginting et al. (2024) menekankan bahwa keberhasilan program publik diukur dari kemampuannya menyediakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Lebih lanjut, upaya dalam pemberian alat pertanian ini sebagai komitmen pemerintah yang diperlukan untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hidayah et al. (2024) bahwa bantuan alat tersebut bukan sekadar amal, melainkan investasi aset produktif yang memungkinkan warga meningkatkan kapasitas ekonominya secara mandiri. Dengan adanya bantuan alat pertanian, program RT Bersih secara langsung memperluas kapabilitas petani untuk bekerja lebih efisien dan produktif. Sejalan dengan hal tersebut, Lenama (2021) menyatakan bahwa tujuan akhir pembangunan adalah memperluas kapabilitas manusia untuk berfungsi mengoptimalkan pengambilan manfaat yang diinginkan karena persepsi masyarakat terhadap keadilan distribusi manfaat akan menentukan motivasi mereka untuk terus berpartisipasi di masa mendatang.

Terdapat pengambilan manfaat program yang dirasakan dalam bentuk immaterial berupa peningkatan keterampilan warga melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pembinaan Karang Taruna, dan Wawasan Kebangsaan serta penguatan tata kelola melalui pemberian tunjangan operasional bagi pengurus RT. Menurut Lenama (2021) menyatakan bahwa investasi pada pengetahuan dan keterampilan manusia adalah faktor kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, pelatihan yang diberikan Desa Kuala Lapang adalah bentuk pendayagunaan potensi masyarakat yang manfaatnya akan terus dirasakan kedepannya. Di sisi lain, pemberian insentif finansial dan fasilitas operasional menjadi upaya penunjang dalam mensejahterakan kebutuhan hidup bagi RT Desa Kuala Lapang.

Manfaat nyata yang dirasakan telah menumbuhkan kesadaran warga untuk bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Robert (dalam Lenama, 2021) menyatakan bahwa keberlanjutan sebuah proyek sangat bergantung pada persepsi manfaat oleh masyarakat; jika merasa diuntungkan, maka partisipasi dalam pemeliharaan akan muncul secara sukarela tanpa paksaan. Komitmen warga Desa Kuala Lapang untuk merawat hasil fisik dan non-fisik yang telah dicapai. Hal ini juga selaras dengan pandangan Hakim (2017), bahwa indikator tertinggi dari keberhasilan partisipasi adalah ketika masyarakat mampu mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan manfaat program secara mandiri setelah kepentingan eksternal selesai. Masyarakat bukan sekadar objek penerima manfaat, melainkan subjek yang memiliki kontrol atas sumber daya dan manfaat tersebut,

sehingga menciptakan ketahanan program jangka panjang berbasis kemandirian lokal.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat program RT Bersih di Desa Kuala Lapang telah berjalan secara optimal ditinjau dari adanya komitmen dalam menjaga kepemilikan hasil program secara kolektif. Program ini tidak hanya sukses mendistribusikan manfaat fisik berupa infrastruktur dan alat produksi pertanian yang mendukung ekonomi warga, tetapi juga berhasil menyalurkan manfaat non-fisik berupa peningkatan keterampilan dan penguatan tata kelola kelembagaan RT melalui insentif operasional. Keberhasilan distribusi manfaat yang adil ini menjadi faktor kunci yang menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif di tengah masyarakat. Karena warga dan pengurus RT merasakan dampak positif yang nyata baik berupa kemudahan kerja, peningkatan kemampuan, maupun dukungan operasional secara alami terbentuk kesadaran untuk merawat dan menjaga hasil pembangunan tersebut demi keberlanjutan program di masa depan.

#### 4. Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi merupakan fase krusial yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial sekaligus instrumen penjamin mutu dalam siklus manajemen pembangunan. Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011) menyatakan bahwa partisipasi pada tahap ini tidak menempatkan masyarakat sekadar sebagai objek yang dinilai, melainkan sebagai subjek aktif yang terlibat langsung dalam memonitor kinerja program, menilai kesesuaian antara hasil dengan tujuan awal, serta mengidentifikasi penyimpangan atau kendala yang terjadi di lapangan.

Terdapat evaluasi tingkat paling dasar di Desa Kuala Lapang, evaluasi ini dilakukan lewat mekanisme internal yaitu Rembuk RT. Pada pelaksanaan di RT 005, forum ini berjalan sangat aktif yang dibuktikan dengan warga aktif memberikan kritik dan saran untuk keberlanjutan program. Lenama (2021) menekankan bahwa evaluasi pembangunan paling akurat datang dari masyarakat karena yang merasakan dampak langsung dari sukses atau gagalnya sebuah proyek, bukan pejabat di kantor. Namun, situasi berbeda terjadi di RT 006, di mana partisipasi evaluasi sangat minim karena kesibukan warga, sehingga fungsi kontrol diserahkan sepenuhnya kepada pengurus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ginting et al. (2024) menjelaskan bahwa pentingnya forum evaluasi yang tersedia secara formal, tetapi masyarakat tidak memiliki kekuatan nyata untuk memengaruhi keputusan karena kendala waktu atau ketidakpedulian. Oleh karena itu, keputusan pemerintah desa menyerahkan mekanisme evaluasi ke masing-masing RT.

Pemerintah Desa Kuala Lapang melakukan pengawasan aktif dengan turun ke lapangan dan menyediakan kotak saran bagi warga yang pasif di forum terbuka. Selain itu, adanya kewajiban RT menyetor laporan keuangan yang kemudian digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Desa (LKPDDes).

Menurut Kristiniati & Choiriyah (2014) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik hanya bisa tegak jika ada kombinasi antara keluhan warga dan laporan transparan yang dapat diaudit bersama. Lebih lanjut, penggunaan kotak saran sebagai saluran alternatif bagi warga yang sibuk. Ackerman menekankan bahwa pentingnya membuka upaya alternatif bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban pejabat publik secara langsung, melengkapi mekanisme formal yang seringkali kaku dan lambat.

Terdapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa sebagai hasil kerja tahun sebelumnya dibangun untuk merancang perencanaan kedepan. Forum ini bukan sekadar seremonial, tetapi ruang di mana masyarakat dan pemerintah duduk sejajar untuk memutuskan program mana yang lanjut atau tidak. Selain itu, transparansi pemerintah desa terhadap aspirasi RT diakomodasi dalam program terdapat rasa memiliki warga akan tumbuh subur ketika masyarakat melihat bukti nyata bahwa kritik dan saran benar-benar didengar dan diwujudkan dalam kebijakan baru. Hal ini merupakan upaya peran aktif pemerintah desa yang melakukan inisiatif melalui *monitoring* langsung dan sistem pelaporan keuangan yang transparan untuk memperbaiki perencanaan program di tahun berikutnya.

### ***Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program RT Bersih di Desa Kuala Lapang Kabupaten Malinau***

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program RT Bersih di Desa Kuala Lapang mengalami beberapa kendala dalam mendukung kebijakan program RT Bersih. Kendala yang dihadapi tersebut berasal dari segi internal maupun eksternal yang menghambat bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program RT Bersih di Desa Kuala Lapang. Berikut ini hambatan-hambatan yang dirincikan, yaitu:

1. Konflik waktu yang bentrok dan prioritas hidup masyarakat dengan berbagai pekerjaan di Desa Kuala Lapang

Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan Program RT Bersih adalah terjadinya benturan antara jadwal kegiatan program dengan prioritas pekerjaan masyarakat. Struktur demografi pekerjaan di Desa Kuala Lapang didominasi oleh tiga kelompok utama, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan swasta, dan petani, yang masing-masing memiliki kendala waktu spesifik. Bagi kelompok PNS dan karyawan swasta, hambatan muncul dari jam kerja formal, kewajiban lembur, serta kelelahan fisik akibat mobilisasi pulang-pergi kerja. Sementara bagi kelompok petani, partisipasi mereka sangat dibatasi oleh siklus alamiah musim tanam dan panen yang tidak dapat ditunda. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya tingkat kehadiran masyarakat, baik dalam kegiatan fisik maupun dalam forum evaluasi internal RT. Menurut Andreas (2017) menyatakan bahwa masyarakat desa adalah aktor ekonomi yang rasional. Beberapa masyarakat menghadapi biaya

peluang yang tinggi; jika mereka memilih berpartisipasi dalam program RT Bersih, maka mereka harus mengorbankan waktu istirahat atau waktu produktif yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, ketidakhadiran warga bukan semata bentuk resistensi atau apatisme sosial, melainkan keputusan realistis untuk memprioritaskan pemenuhan tanggung jawab ekonomi utama keluarga di atas kewajiban sosial bersama. Meskipun Kepala Desa telah berupaya melakukan penyesuaian mekanisme yang lebih fleksibel, dominasi prioritas ekonomi tetap menjadi penghalang struktural yang signifikan bagi partisipasi pelaksanaan kegiatan dari program RT Bersih.

## 2. Tidak adanya sosialisasi pada awal pelaksanaan kegiatan program RT Bersih pada setiap RT

Hambatan kedua yang melemahkan partisipasi adalah kegagalan penyebarluasan informasi di tingkat RT. Sosialisasi Program RT Bersih memang telah dilaksanakan, namun hanya terpusat secara eksklusif pada forum Musrenbang di tingkat desa. Terdapat ketimpangan informasi, di mana penjelasan mengenai tujuan, mekanisme, dan urgensi program tidak diturunkan secara optimal ke forum internal masing-masing RT. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai urgensi pelaksanaan program RT Bersih. Selain itu, pola komunikasi yang terjadi di tingkat RT, seperti di RT 006, cenderung bersifat instruktif dan dadakan ditinjau dari pengurus RT hanya mengandalkan grup *WhatsApp* untuk mengirimkan himbuan beberapa hari sebelum kegiatan teknis dilaksanakan, tanpa didahului forum sosialisasi khusus yang membahas rencana kerja satu tahun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Lestanata & Pribadi (2016), menjelaskan bahwa partisipasi efektif memerlukan saluran komunikasi yang mampu membangun pengetahuan kesadaran dan pengetahuan penggunaan dalam menjalankan program. Ketika komunikasi hanya berbasis instruksi *via WhatsApp* tanpa dialog tatap muka yang mendalam, partisipasi masyarakat tereduksi menjadi sekadar mobilisasi fisik jangka pendek. Masyarakat berpartisipasi karena diundang atau dihimbau sesaat, bukan karena kesadaran penuh yang terbangun dari pemahaman mendalam terhadap tujuan jangka panjang program. Hal ini secara langsung menghambat partisipasi masyarakat dalam program RT Bersih karena masyarakat tidak memiliki bekal informasi yang cukup untuk memberikan masukan atau penilaian yang substansial.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program RT Bersih di Desa Kuala Lapang telah berjalan, namun belum optimal ditinjau dari berbagai aspek bentuk partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff, yaitu (1) Aspek bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait program RT Bersih di Desa Kuala Lapang telah berjalan, namun belum optimal mengacu pada keterlibatan

masyarakat belum secara aktif mengikuti kegiatan Program RT Bersih dan terdapat beberapa wilayah RT yang belum mengakomodir kebutuhan masyarakat, (2) Aspek bentuk partisipasi dalam pelaksanaan terkait program RT Bersih di Desa Kuala Lapang telah berjalan, namun belum optimal mengacu pada pelaksanaan kegiatan yang tidak dihadiri oleh beberapa masyarakat karena aktivitas primer seperti pekerjaan dan ibadah. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat rendah di beberapa wilayah RT Desa Kuala Lapang, terdapat pelaksanaan kegiatan yang berjalan dengan lancar serta difasilitasi dengan anggaran yang memadai untuk menunjang program RT Bersih yang berfokus pada berbagai bidang, (3) Aspek partisipasi dalam pengambilan manfaat terkait program RT Bersih di Desa Kuala Lapang telah berjalan optimal ditinjau dari adanya hasil program berupa infrastruktur desa. Selain itu, program RT Bersih menyalurkan dukungan bantuan kepada masyarakat desa yang mengalami kesulitan. Serta terdapat kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya manusia agar dapat meningkatkan kualitas masyarakat desa secara kompeten. Hasil program RT Bersih yang dimiliki oleh Desa Kuala Lapang menjadi penunjang utama dalam meningkatkan kemajuan desa secara kolektif, dan (4) Aspek partisipasi dalam evaluasi terkait program RT Bersih di Desa Kuala Lapang telah berjalan optimal ditinjau dari adanya Rembuk RT dari masing-masing pihak RT Desa Kuala Lapang. Hal tersebut menjadi wujud forum umpan balik terkait program RT Bersih. Pemerintah Desa Kuala Lapang berperan sebagai pengawas dan fasilitator dalam memastikan akuntabilitas program RT Bersih. Selain itu, pemerintah desa melakukan pelaporan secara sistematis kepada pemerintah kabupaten setiap tahun berupa laporan keuangan desa dan laporan kegiatan program RT Bersih.

Adapun Faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program RT Bersih di Desa Kuala Lapang, yaitu karena adanya konflik waktu antara pekerjaan yang dimiliki masyarakat dengan pelaksanaan Program RT Bersih dan tidak adanya sosialisasi pada awal pelaksanaan kegiatan program RT Bersih pada setiap RT sehingga menyebabkan adanya kendala yang melemahkan bentuk partisipasi masyarakat terhadap program.

### **Saran**

1. Pengurus masing-masing RT di Desa Kuala Lapang sebaiknya melakukan penyusunan jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan dan waktu luang Masyarakat. Pengurus RT juga diharapkan untuk tidak memaksakan satu jadwal tunggal untuk seluruh masyarakat, perlu diterapkan sistem pembagian jadwal berdasarkan ketersediaan kelompok profesi.
2. Pemerintah Desa Kuala Lapang dan pengurus RT sebaiknya dapat meningkatkan intensitas forum sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat, khususnya pada tahap awal perencanaan sebelum kegiatan Program RT Bersih dimulai. Forum ini diharapkan tidak hanya sekedar himbuan di grup WhatsApp, melainkan pertemuan tatap muka untuk meningkatkan pemahaman serta rasa memiliki Masyarakat terhadap program.

## Daftar Pustaka

- Andreas, D. (2017). Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Jurnal Paradigma*, 4(1), 1-9.
- Ariani, O. E. (2015). *Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Tugas (Satgas) Gerakan Desa Membangun (Gerdema) Sebagai Pendamping Aparatur Desa Di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau*.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Fatimah, S., Jusniaty, J., Syamsuddin, S., & Mukrimah, M. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Lingkungan Bersih dan Sehat di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah. *Journal of Government Insight*, 2(2), 238-251.
- Ginting, G., Kuswandi, A., & Budiati, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kandui: Faktor Pengaruh dan Tantangan. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 112-129.
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 43-43.
- Hidayah, H., Arpandi, A., & Hasbiyah, S. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Mundar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(1), 101-107.
- Hutagalung, S. S. (2022). *Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik*. Literasi Nusantara Abadi.
- Isnaini, M. A., Iripinsyah., Saputra, R. D. (2025). Partisipasi Rukun Tetangga (RT) dan Masyarakat Dalam Menciptakan Lingkungan Yang Aman Serta Bersih di RT 12 Simpang Kades Kecamatan Sukarami. *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 3(2), 81-85.
- Kristiniati, R., & Choiriyah, I. U. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Desa Bligo Kabupaten SidoarjoCommunity Participation in the Implementation of the National Urban Independent Community Empowerment Program (PN. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(2), 205-220.
- Lenama, M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 1(1), 132-144.
- Lestanata, Y., & Pribadi, U. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat

- Tahun 2014–2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(3), 368-389.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Moleong, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rachman, M. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. CV Tahta Media Grup.
- Satibi, I. (2012). *Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*. Penerbit Ceplas.
- Siagian, S. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.
- Willius, J. (2022). Implementasi Program RT-BERSIH (Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah, dan Harmonis). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(3), 370-382.